

DAMPAK KREDIT P4K TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELUARAN KELUARGA PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN

Zahron Helmy

*Penyuluh Pertanian Muda - Badan Pengembangan SDM Pertanian
Departemen Pertanian RI*

ABSTRACT

The research of credit Impact for Rural Income Generation Project (RIGP) on Family Farmers Income and Expenditure is aimed to know program impact to educational aspect, family-member health and SFFs community social activity. And economically the research also have purpose to know credit impact on venture volume, income, family consumption, as well on employment and income distribution.

The research is conducted in Grobogan District Central Java, on 222 SFFs, in 12 sub-districts, 42 villages, and 44 Small Farmer Groups (SFGs) of RIGP program participant, by using descriptive analysis, regression analysis model, and Gini index as well poverty index.

The research result shows descriptively occurred significant quite improvement for physical condition and SFFs family environment of RIGP program participant, which shown by the higher family-member percentage following formal education level, higher utility percentage of health facility and SFFs behaviour change for participating in community social activity in their village.

Based on statistical calculation it is obtained that low category credit value Impact on SFFs employment ($t_{-cal}=4.143$), which have impact on income ($t_{-cal}=1.839$). But high category credit value, the credit addition even reducing SFFs employment itself ($t_{-cal}=2.133$). This is caused by for uncreating market, marketing network and product/venture diversification from SFFs. For middle category credit value, credit value impact on venture volume ($t_{-cal}=2.051$), which has impact on consumption ($t_{-cal}=2.439$).

While SFFs income distribution of RIGP participant in Grobogan District it is obtained value ($GC=0.32$), be in middle inequality ($GC=0.30$ to 0.40), which means that relative income less spread unaveragely in each SFFs program participant. And for middle category credit, GC value is relative higher compared to high and low category credit value, namely as large as ($GC=0.35$). This value shows that income distribution for each SFFs of middle category credit receiver exists significant quite income inequality, which relative higher than high and low category credit value receiver SFFs.

Furthermore, based on poverty standard of Grobogan District which measured based on income per capita/month as large as Rp. 74,007,- it has been achieved value 51,35% credit receiver SFFs still be in poor condition, with the lowest inequality level on high category credit receiver as large as $PG=0,1801$.

Keywords: RIGP credit impact, income distribution, poverty inequality.

PENDAHULUAN

Kemiskinan (*poverty*), secara konseptual dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Menurut Malasis (1975), Erwan, Watasen (1998), indikator kemiskinan ditandai dengan tingkat pendapatan rendah dari masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya produksi dan pengangguran tenaga kerja, yang mengakibatkan tingkat investasi rendah serta permintaan perkapita rendah.

Upaya mengurangi kemiskinan tersebut, oleh Bank Dunia (Carvalho dan White, 1994) disarankan 2 (dua) strategi penanggulangannya yaitu: (1) menyangkut peningkatan wilayah pertumbuhan/pembangunan (ekonomi), yang memungkinkan dapat digunakannya secara efisien asset tenaga kerja melimpah pada kelompok masyarakat yang paling miskin, (2) menyangkut pengadaan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin.

Menurut Todaro (1987), keberhasilan dari pertumbuhan/pembangunan ditunjukkan oleh 3 (tiga) nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sedangkan Slamet (1992), berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari suatu *inner will*, proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi yang kreatif dalam proses pembangunan serta hanya menjadi mungkin dengan adanya proses pendewasaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekedar keterlibatan fisik, tetapi justru yang lebih penting adalah tergerakannya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya sendiri.

Selanjutnya Soemodiningrat (1999) menyatakan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat tersebut membutuhkan rencana dan

langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan bagi masyarakat yang telah maju ataupun modern, sebaiknya lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk maju. Sedangkan bagi masyarakat tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal, tetapi juga menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang maju dan yang tertinggal atau belum berkembang, sehingga memunculkan dinamika dari masyarakat oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendapatkan perhatian besar sejak PJP I melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), yang oleh Departemen Pertanian dirancang sejalan dengan strategi pembangunan pertanian yang dipolakan sebagai suatu usaha pengentasan kemiskinan, melalui perubahan pola pikir dan perilaku usaha masyarakat miskin serta penyediaan dukungan dana melalui skim kredit tanpa agunan, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di perdesaan, dengan memperhatikan aspek-aspek; pemerataan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Adapun tujuan utama proyek adalah (1) peningkatan pendapatan petani marjinal dan tidak berlahan, (2) perbaikan ketahanan petani kecil, serta (3) pengefektifan program penyuluhan terpadu yang sesuai dengan kondisi ekosistem dan potensi sumberdaya setempat.

Penelitian terhadap proyek P4K dilakukan selain mengingat proyek sudah berlangsung kurang lebih 23 tahun (1979/1980 s.d 1998/2004), juga bertujuan mengetahui dampak kredit terhadap kesempatan kerja, volume usaha, pendapatan maupun konsumsi keluarga, yang berakibat kepada pemerataan (distribusi) pendapatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Nasir, 1999). Pengambilan sampel dilakukan secara (*purposive sampling*), dengan rancangan sampel

bertahap dua (*two-stages sampling design*). Tahap pertama dengan memilih kecamatan secara *probability proporsional to size-linier systematic sampling* berdasarkan ukuran banyaknya PNK pada setiap KPK. Tahap kedua memilih 5 PNK pada setiap KPK terpilih secara *linier systematic sampling*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil kerjasama Proyek P4K Propinsi Jawa Tengah dengan Magister Manajemen Agribisnis (MMA) UGM, dimana penulis bertindak selaku pengambil dan analisis data.

Dan berdasarkan data tersebut ditetapkan Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian dengan sampel sejumlah 222 PNK dari 44 KPK, 42 desa pada 12 kecamatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel (distribusi frekuensi) dan analisis regresi dengan uji F dan uji t. Selanjutnya untuk mengetahui rasio kemiskinan digunakan analisis distribusi pendapatan (*Coefficeint Gini*) dan kesenjangan pendapatan (*poverty gap*), dengan metode analisis data sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak nilai kredit P4K terhadap kesempatan kerja, volume usaha, pendapatan dan konsumsi dilakukan analisis dengan rumus:

$$\ln K = b_0 + b_1 \ln nka + b_2 \ln a + b_3 f + b_4 \text{art} + b_5 \text{pdd} + b_6 u + b_7 \text{kpk} + b_8 \text{ku} + b_9 t + b_{10} \text{kur} + e$$

$$\ln Q = b_0 + b_1 \ln nka + b_2 \ln a + b_3 f + b_4 \text{art} + b_5 \text{pdd} + b_6 u + b_7 \text{kpk} + b_8 \text{ku} + b_9 t + b_{10} \text{kur} + e$$

$$\ln Y = b_0 + b_1 \ln Q + b_2 \ln K + b_3 \ln nka + b_4 \ln a + b_5 f + b_6 \text{art} + b_7 \text{pdd} + b_8 u + b_9 \text{kpk} + b_{10} \text{ku} + b_{11} t + b_{12} \text{kur} + e$$

$$\ln C = b_0 + b_1 \ln Y + b_2 \ln Q + b_3 \ln K + b_4 \ln nka + b_5 \ln a + b_6 f + b_7 \text{art} + b_8 \text{pdd} + b_9 u + e$$

Keterangan :

- K = Kesempatan Kerja bagi PNK (jam kerja)
- Q = Peningkatan Produksi/Volume Usaha (Rp)
- nka = nilai kredit akhir (Rp)
- a = angsuran (Rp)
- f = frekuensi menerima kredit
- art = jumlah anggota rumah tangga (org)

- pdd = tingkat pendidikan
- u = umur pnk (thn)
- kpk = jumlah anggota kpk (org)
- ku = frekuensi kunjungan PPL
- t = lama dalam kunjungan PPL (jam)
- kur = frekuensi kursus
- e = kesalahan pengganggu

2. Untuk mengetahui rasio kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan dianalisis menggunakan rumus :

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1}) \text{ atau } GC = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

$$H = \frac{q}{n} \text{ dan } PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Keterangan :

- GC = gini coefficient
- PG = poverty gap
- HI = head-count index

- X_i = proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
- f_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Yi = proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i
 Q = jumlah keluarga miskin.

Z = garis kemiskinan
 i = jumlah kelas
 n = banyak sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak P4K Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga PNK

Dampak P4K dapat dilihat dari aspek pendidikan yang diukur dari persentase jumlah anggota/tanggungannya keluarga PNK mengikuti pendidikan, aspek kesehatan diukur dari jumlah PNK yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan aspek perubahan perilaku yang diukur dari frekuensi PNK mengikuti kegiatan sosial serta aspek ekonomi rumah tangga (kesejahteraan).

Berdasarkan struktur pendidikan diketahui bahwa dari sejumlah 430 jiwa anggota/tanggungannya keluarga PNK, 78,60% mengikuti

program pendidikan formal, yaitu pendidikan setingkat SD (65,09%), SLTP (24,85%) dan SLTA (9,76%). Tingginya persentase anggota keluarga mengikuti pendidikan menunjukkan kemampuan PNK dalam pembiayaan pendidikan. Dan dari berbagai sarana/fasilitas kesehatan yang dimiliki, diketahui bahwa 78,50% PNK sudah memanfaatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan disamping klinik (5,30%) dan dokter praktek (15,00%).

Selanjutnya dalam hal perubahan perilaku, secara relatif terjadi peningkatan sesudah PNK mengikuti P4K, khususnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Perubahan perilaku PNK ini ditunjukkan Tabel 1. berikut :

Tabel 1. Perubahan Perilaku PNK Peserta Program P4K di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

	Uraian	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Aspek Perilaku	Perhelatan	96,80	98,80
	Pertemuan RT/RW	90,30	94,00
	Kegiatan Keagamaan	94,00	95,60
	Arisan	94,00	97,80
	Kegiatan sosial	95,20	98,00

Sumber : Analisis data primer, 2003

Jika dilihat dari aspek ekonomi rumah tangga, diketahui bahwa pendapatan rata-rata PNK Rp. 293.761,26,- per bulan dimana 25,49% pendapatan didapatkan dari usaha sampingan. Dan jika diukur berdasarkan garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan sebesar Rp 74.007,- per kapita/bulan maka pendapatan PNK relatif di atas garis kemiskinan yaitu sebesar Rp. 82.233,17,- per kapita/bulan.

Ditinjau dari aspek kesejahteraan, 74,50% PNK menyatakan bahwa setelah mengikuti program P4K mengalami peningkatan kesejahteraan rumah tangga sendiri secara keseluruhan. Perkembangan kesejahteraan ini didukung oleh 80,20% PNK yang menyatakan terjadinya peningkatan pendapatan keluarga setelah mengikuti P4K. Adapun peningkatan pendapatan tersebut diperoleh PNK di bidang usaha

perdagangan (pedagang keliling/ bakulan) (44,14%) dan pertanian (pertanian kecil) (39,64%).

Peningkatan pendapatan tersebut oleh PNK (78,90%) baru dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan modal usaha, baik pengembangan ataupun kesempatan berusaha, dan belum memberikan arti bagi perubahan konsumsi keluarga. Hal ini ditunjukkan dari kenyataan bahwa hanya 53,15% dan 59,01% rumah tangga PNK yang mempunyai kemampuan menyediakan makanan pokok maupun kemampuan membeli makanan pokok tersebut di pasar terdekat.

Adapun kondisi ini relatif sama baik dengan kondisi sebelum PNK mengikuti program P4K. Hasil analisis terhadap kesejahteraan ditunjukkan pada Tabel 2.

Dampak Kredit terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja, Volume Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Keluarga.

Berdasarkan nilai kredit yang diperoleh masing-masing PNK, kredit dibedakan ke dalam 3 (tiga) katagori yaitu : (a) dikatagorikan rendah untuk penerima kredit nilai kurang dari Rp. 300.000,-, (b) katagori sedang untuk penerima kredit nilai Rp. 300.000 s.d Rp. 500.000,- dan (c) katagori tinggi untuk penerima kredit nilai lebih dari Rp. 500.000,-.

Hasil analisis regresi menunjukkan, nilai kredit katagori rendah memberikan pengaruh cukup signifikan ($t_{hit} = 4,143$) terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi PNK, dan secara relatif berdampak kepada peningkatan pendapatan ($t_{hit} = 1,839$). Hasil ini bertolak belakang untuk nilai kredit katagori tinggi, dimana penambahan kredit yang diperoleh PNK

justru menurunkan kesempatan kerja bagi PNK itu sendiri ($t_{hit} = -2,133$). Sedangkan untuk nilai kredit katagori sedang, nilai kredit memberikan pengaruh pada peningkatan volume usaha ($t_{hit} = 2,051$), dan berdampak kepada peningkatan konsumsi ($t_{hit} = 2,439$).

Adapun tidak berpengaruhnya kredit terhadap peningkatan pendapatan tetapi justru kepada konsumsi diindikasikan terjadi karena tidak terciptanya peluang pasar dan pemasaran serta jaringan kemitraan baik antar KPK maupun KPK dengan pihak luar. Hal ini terlihat dari lapangan usaha PNK, yang umumnya bergerak di bidang perdagangan (pedagang bakulan) dan pertanian (petani kecil), dengan lokasi pemasaran (57,00%) di desa yang sama dan dengan produk relatif homogen. Hasil analisis regresi terhadap nilai kredit ditunjukkan Tabel 3.

Tabel 2. Aspek Kesejahteraan Rumah Tangga PNK penerima Kredit P4K di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah

No	Uraian	Sama buruk (%)	Sama baik (%)	Lebih baik (%)
1	Pendapatan RT	3,15	17,57	78,38
2	Jenis/kualitas konsumsi makanan pokok	2,70	54,05	42,34
3	Persediaan makanan pokok/ uang/ barang utk membeli makanan pokok	1,80	53,15	43,24
4	Kemampuan membeli makanan pokok di pasar terdekat	1,80	59,01	38,29
5	Kemampuan membeli lauk pauk	2,70	53,60	42,79
6	Pakaian anggota RT	1,80	54,04	42,34
7	Kesehatan anggota RT		68,02	31,98
8	Kualitas perumahan	2,71	42,08	55,20
9	Kualitas fasilitas transportasi yang digunakan RT	4,95	63,51	29,73
10	Kemampuan memenuhi kebutuhan biaya/ perlengkapan pendidikan		45,62	51,80
11	Kemampuan memenuhi kebutuhan modal usaha	1,80	17,12	79,73
12	PerkembG. tingk. kesejahteraan RT secara keseluruhan	1,80	21,17	74,77

Sumber: Analisis data primer, 2003

Tabel 3. Pengaruh Nilai Kredit terhadap Kesempatan Kerja, Volume Usaha, Pendapatan dan Konsumsi

Uraian	Kategori Nilai Kredit					
	Rendah		Sedang		Tinggi	
	Koef. regresi	t- hit	Koef. regresi	t- hit	Koef. regresi	t- hit
Kesempatan Kerja (jam kerja)	42.539***	4.143	54.510	0.635	-99.018**	-2.133
Volume Usaha (Rp)	-0.539	-1.046	8.1776**	2.051	-1.4617	-0.743
Pendapatan (Rp)	1.091*	1.839	1.537	0.365	3.0159***	2.661
Konsumsi (Rp)	0.245	0.499	0.704	0.329	1.199	0.623

Sumber : Data primer diolah, 2003

Keterangan :

*) signifikan pada taraf 10%

***) signifikan pada taraf 5%

****) signifikan pada taraf 1%

Berdasarkan perbandingan masing-masing katagori penerima kredit, maupun dari sebaran atau pemerataan PNK penerima kredit, maka secara umum kredit P4K belum memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat penerima kredit. Ini ditunjukkan dari nilai kesempatan kerja (41,67 jam/minggu), nilai volume usaha (Rp. 366.666,67/bln), nilai pendapatan (Rp. 253.333,34/bln) maupun nilai konsumsi (Rp. 133.333,34/bln) yang masih di bawah nilai rata-rata keseluruhan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kredit sebagai faktor produksi yang diikuti dengan bimbingan serta pengawasan belum berdampak kepada pendapatan maupun konsumsi keluarga. Sedangkan peningkatan volume usaha maupun peningkatan pendapatan, jika dilihat dari sebaran pendapatan baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil dari PNK yang menjadi anggota KPK. Ini tentu sangat tidak relevan dengan target yang ingin dicapai oleh proyek P4K, yang memberikan pendekatan kredit kepada kelompok, dengan harapan bahwa akan terjadi simbiosis antara anggota di dalam kelompok dan membawa keberhasilan secara menyeluruh kepada setiap anggota.

Ketimpangan yang ditunjukkan baik dari sisi peningkatan volume usaha maupun peningkatan pendapatan, dapat terjadi disebabkan karena beberapa fungsi manajemen seperti

bimbingan dan pengawasan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Seperti halnya kursus dan pelatihan yang frekuensi penyampaianya relatif cukup tinggi (maksimum 8 kali), berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa itu diberikan hanya sebatas penyampaian informasi, yang terkadang tidak tepat waktu dan tidak tepat guna. Terkesan penyampaian diberikan sesuai dengan target atau paket program. Sedangkan Rencana Usaha Bersama maupun Rencana Usaha Anggota (RUB/RUA), yang menjadi tolok ukur realisasi kredit, justru tidak mampu menjembatani kebutuhan PNK secara cepat, dikarenakan tidak disiapkannya petugas-petugas Bank di lokasi setingkat kecamatan.

Selain itu juga tidak tersedianya sarana-sarana pendukung seperti peluang pasar, tempat pemasaran dan mitra usaha bagi beberapa PNK yang usahanya berkembang baik.

Luasnya cakupan kegunaan kredit yang dikembangkan, mulai dari sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan) sampai kepada sektor jasa (becak, ojek, montir), juga dapat menjadi salah satu faktor sulitnya melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ekonomi produktif PNK, disamping keterbatasan sumberdaya pendamping lapangan baik dari sisi jumlah maupun keterampilan yang dimiliki.

Bunga komersial (22,5% per tahun) dengan sistim tanggung renteng yang diterapkan jatuh tempo setiap bulan, kemudian ditambah simpanan wajib anggota di kelompok, merupakan penyebab lain sulit berkembangnya usaha PNK yang notabene dalam kondisi miskin.

Oleh sebab itu dengan nilai kredit relatif rendah tidak mengherankan jika usaha yang

berkembang hanya di bidang pertanian dan perdagangan (kecil/bakulan), bahkan cenderung kepada simpan pinjam, yang secara relatif mampu memberikan hasil, guna mengembalikan kredit. Sebaran secara statistik untuk melihat dari masing-masing katagori penerima kredit terhadap kesempatan kerja, volume usaha, pendapatan dan konsumsi ditunjukkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sebaran Perbandingan Penerima Kredit P4K Secara Statistik.

No	Uraian	Nilai Kredit		
		rendah	sedang	tinggi
1	<i>Mean</i>			
	Kesempatan Kerja jam/minggu)	41,11	44,13	40,27
	Volume Usaha (Rp/bln)	419.148,9	444.181,8	430.820,9
	Pendapatan (Rp/bln)	274.680,9	309.763,6	307.014,9
	Konsumsi (Rp/bln)	138.375,61	152.668,6	133.050
2	<i>Median</i>			
	Kesempatan Kerja jam/minggu)	41	42	42
	Volume Usaha (Rp/bln)	400.000	400.000	300.000
	Pendapatan (Rp/bln)	210.000	250.000	300.000
	Konsumsi (Rp/bln)	136.300	140.275	123.425
3	<i>Koefisien Variasi</i>			
	Kesempatan Kerja (jam/minggu)	0,33	0,32	0,34
	Volume Usaha (Rp/bln)	0,58	0,60	0,60
	Pendapatan (Rp/bln)	0,56	0,65	0,55
	Konsumsi (Rp/bln)	0,38	0,46	0,43
4	<i>Rasio Skewness</i>			
	Kesempatan Kerja (jam/minggu)	0,14	0,71	0,57
	Volume Usaha (Rp/bln)	2,57	1,83	3,24
	Pendapatan (Rp/bln)	3,56	4,02	2,86
	Konsumsi (Rp/bln)	0,64	2,36	2,52

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan tabel 4 di atas, kesempatan kerja yang diukur dengan jam kerja/minggu, dari masing-masing katagori nilai kredit secara keseluruhan masih dibawah nilai rata-rata (41,83 jam/minggu). Ini menunjukkan bahwa kredit yang diberikan belum memberikan kesempatan kerja kepada PNK secara optimal. Tetapi jika membandingkan antara ketiga katagori kredit yang diberikan, maka nilai kredit katagori tinggi relatif lebih memberikan kesempatan kerja

kepada PNK (42 jam/minggu). Kesempatan kerja yang diperoleh setiap PNK dari masing-masing katagori nilai kredit relatif sama, ditunjukkan dari nilai kredit yang kurang bervariasi dikarenakan jenis pekerjaan relatif homogen yaitu di bidang pertanian dan pedagang kecil (bakulan), yang memerlukan waktu kerja lebih banyak. Dan dari rasio skewness (distribusi data), maka kesempatan kerja dari masing-masing katagori nilai kredit

rendah, sedang maupun tinggi untuk setiap PNK penerima kredit relatif menyebar normal.

Peningkatan produksi yang diukur dengan volume usaha, dari masing-masing katagori nilai kredit secara keseluruhan kurang bervariasi (rata-rata 0,59) dan masih di bawah nilai rata-rata (Rp. 431.383,90). Sedangkan rasio skewness, untuk nilai kredit katagori sedang, memberikan peningkatan volume usaha yang relatif lebih merata kepada setiap PNK (1,83). Tetapi untuk nilai kredit katagori rendah dan tinggi, terdapat kesenjangan peningkatan volume usaha yang relatif besar pada setiap PNK, yang ditunjukkan dari nilai rasio skewness sebesar (2,57) dan (3,24). Ini menunjukkan peningkatan volume yang tinggi hanya diperoleh oleh sebagian kecil PNK saja.

Pendapatan untuk nilai kredit katagori sedang relatif lebih bervariasi (0,65) jika dibandingkan dengan nilai kredit katagori rendah dan tinggi, tetapi pendapatan dari masing-masing katagori nilai kredit masih dibawah nilai rata-rata (Rp. 297.153,10). Dan berdasarkan rasio skewness, maka secara keseluruhan terdapat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dari setiap PNK dalam setiap katagori nilai kredit. Untuk nilai kredit katagori sedang, ketimpangan pendapatan relatif lebih besar (4,02) dibandingkan dengan nilai kredit katagori rendah dan tinggi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak menyebar normal kepada setiap PNK anggota KPK.

Konsumsi dari masing-masing katagori nilai kredit masih di bawah rata-rata (Rp. 141.364,70). Konsumsi untuk nilai kredit katagori sedang relatif lebih bervariasi (0,46)

dibandingkan untuk katagori rendah dan tinggi. Dan dilihat dari rasio skewness, maka konsumsi untuk PNK penerima kredit katagori rendah relatif lebih merata dibandingkan dengan konsumsi untuk nilai kredit katagori sedang dan tinggi. Ketimpangan konsumsi sangat tinggi terjadi pada PNK penerima kredit katagori tinggi (2,52).

Dampak P4K Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesenjangan Kemiskinan.

Salah satu ukuran pemerataan adalah distribusi pendapatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Koefisien Gini (*Gini Coefficient*). Bagian pendapatan masing-masing orang (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran (*size distribution of income*) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, yang tidak mempersoalkan cara mendapatkannya.

Hasil penelitian terhadap PNK peserta program P4K di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan untuk seluruh PNK yang didasarkan atas ukuran pendapatan perkapita diperoleh nilai Koefisien Gini (GC) sebesar 0,32. Nilai koefisien ini menurut kriteria Oshima berada dalam ketimpangan sedang (GC=0,30 s.d 0,40), yang berarti bahwa distribusi pendapatan dari seluruh PNK peserta program P4K relatif kurang menyebar merata. Distribusi pendapatan dari masing-masing katagori kredit ditunjukkan tabel 5 berikut :

Tabel 5. Distribusi Pendapatan PNK Peserta P4K di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Golongan	Pendapatan PNK dalam Klas (%)			
	NK rendah	NK sedang	NK tinggi	Total
Termiskin (20%)	9,05	6,67	8,45	7,60
Kedua (20%)	12,23	11,54	11,51	11,76
Pendapatan kumulatif (%)	(21,28)	(18,21)	(19,96)	(19,36)
Ketiga (20%)	19,04	16,95	18,70	17,99
Pendapatan kumulatif (%)	(40,32)	(35,16)	(38,65)	(37,35)
Keempat (20%)	21,61	23,44	25,02	24,76
Pendapatan kumulatif (%)	(61,93)	(58,60)	(63,68)	(62,11)
Kaya (20%)	38,07	41,40	36,32	37,89

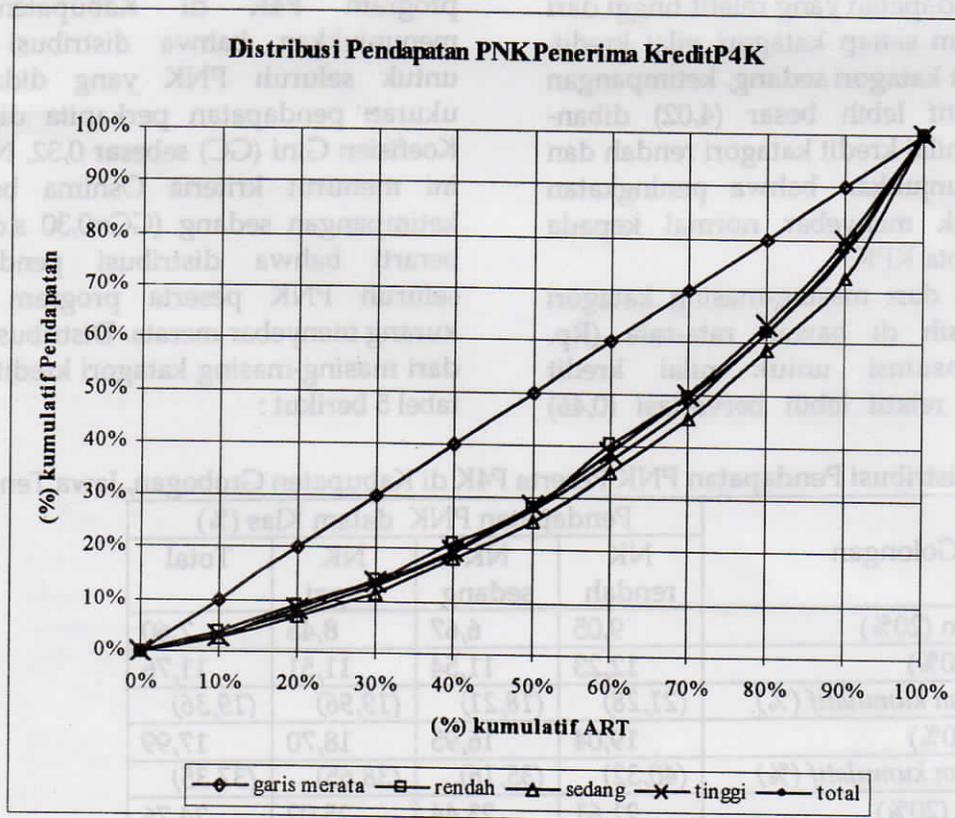
Pendapatan kumulatif (%)	100	100	100	100
Gini Coefficient	0,29	0,35	0,30	0,32

Sumber : Data primer diolah, 2003

Jika membandingkan koefisien gini dari masing-masing katagori nilai kredit, baik untuk kredit katagori rendah, sedang dan tinggi, maka diperoleh angka koefisien gini untuk katagori kredit sedang sebesar (GC=0.35), relatif lebih tinggi dari nilai kredit katagori rendah dan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang relatif besar pada setiap PNK penerima kredit katagori sedang, jika dibandingkan dengan penerima kredit katagori rendah dan tinggi. Secara grafis distribusi pendapatan ini digambarkan oleh kurva Lorenz yang diukur berdasarkan persentase pendapatan setiap PNK dalam katagori penerima kredit peserta program P4K.

Pengukuran berdasarkan tingkat kemiskinan dengan pendekatan jumlah orang (*head-*

count measure) yang berada di bawah garis kemiskinan, dan menggunakan standar garis kemiskinan di kabupaten Grobogan sebesar Rp. 74.007,- per kapita/bulan, diketahui bahwa 51,35% total PNK peserta program P4K masih berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan berdasarkan kriteria katagori nilai kredit yang diperoleh diketahui bahwa untuk penerima kredit katagori tinggi, tingkat kemiskinan (50,75%) relatif lebih rendah di bandingkan dengan PNK penerima kredit katagori rendah dan sedang. Selanjutnya dilihat dari kesenjangan kemiskinan diperoleh nilai kesenjangan kemiskinan PNK penerima kredit katagori tinggi (PG=0.1810) relatif lebih kecil dibandingkan dengan PNK penerima kredit katagori rendah dan sedang.



Gambar 1. Kurva Lorenz - Pendapatan PNK Peserta Program P4K

Ini berarti bahwa kesenjangan kemiskinan bagi PNK penerima kredit katagori tinggi secara relatif hanya membutuhkan 18.10% sumberdaya untuk peningkatan pendapatan agar keluar dari batas garis kemiskinan di kabupaten Grobogan. Dan nilai square PG=0,0877 dari penerima kredit katagori tinggi

lebih rendah dibandingkan dengan katagori penerima kredit rendah dan sedang, menunjukkan bahwa PNK pendapatan miskin pada penerima kredit katagori tinggi relatif lebih merata. Hasil analisis tingkat kemiskinan ditunjukkan tabel 6 berikut:

Tabel 6. Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Kemiskinan PNK Penerima Kredit P4K.

Katagori Nilai Kredit	Tingkat kemiskinan dan Kesenjangan Kemiskinan			
	Head-count index (HI)	Poverty Gap (PG)	Ratio (HI) dan (PG)	Square (PG)
Rendah	0,57	0,22	15,16	0,11
Sedang	0,55	0,23	16,05	0,13
Tinggi	0,51	0,18	16,93	0,09
Total	0,51	0,21	5823,70	0,11

Sumber : Data primer diolah, 2003

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Program/proyek P4K memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keluarga PNK, khususnya dalam perbaikan pendidikan anggota keluarga, perubahan perilaku dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan serta tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
2. Proyek P4K secara relatif belum berpengaruh terhadap perubahan volume usaha, pendapatan maupun konsumsi keluarga PNK peserta program P4K.
3. Proyek P4K relatif memberikan kesempatan kerja yang berdampak terhadap pendapatan dan distribusi pendapatan PNK peserta program P4K.

Implikasi Kebijakan

1. Mengingat program P4K adalah program pemberdayaan masyarakat miskin, maka hendaknya pemberian kredit sebagai faktor produksi dapat diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana seperti pasar desa, jaringan mitra usaha.
2. Mengingat program pemberdayaan tersebut dalam rangka peningkatan kemampuan

PNK dalam berusaha dan pembentukan jiwa kewirausahaan maka bimbingan dan pengawasan hendaknya lebih diarahkan kepada kegiatan produktif dalam bentuk praktek dan studi banding.

3. Mengingat program ini menggunakan pendekatan kredit dengan bunga komersial, maka dipandang perlu mengkaji ulang sistim tanggung renteng dan RUB sebagai acuan pencairan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhit, Izzedin, Nicole Goler Von Ravensburg, Hans H. Munker, Victoria Walter, Thomas Walter., 1996. *Attacking The Roots of Poverty*. Marburg Consult For Self-Help Promotion. *Menggempur Akar-akar Kemiskinan*. Yakoma PGI, Jakarta. 2001.
- BPS. 2000. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2001. *Kabupaten Grobogan Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kab. Grobogan. Purwodadi.

- Departemen Pertanian, 2002. "P4K Sebuah Alternatif Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat". Badan Pengembangan SDM Pertanian. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) Pusat. Jakarta.
- Erwan, Watasen. 1998. *Analisis Pendapatan Petani Miskin di Pedesaan. Studi Kasus Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Gaiha, R. 1993. *Design of poverty alleviation strategy in rural areas. Economics and social development paper*. FAO. Rome.
- MMA-UGM. 2002. *Laporan Studi Dampak P4K terhadap Peningkatan Kesejahteraan PNK Propinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta.
- Nassir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Ravallion, M., 1992. *Poverty Comparisons., A guide to Concepts and Methods*, The World Bank. Washington, D.C.
- Slamet, M. 1992. *Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas, dalam Penyuluhan Pembangunan di Indonesia; Menyongsong Abad XXI*, PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.
- Soniya Carvalho and Howard White., 1994. "Indicator for Monitoring Poverty Reduction", World Bank Discussion Paper.
- Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1987. *Economics for a Developing World, An Introduction to principle, problems and policies for development*. Longman Inc, New York USA.
- White, K. J, Linda, Bui, T.M., 1991. *The Practice of Econometrics A. Computer Handbook Using Shazam*. Addison-Wesley. Publishing Company Inc. United States of America.
- Widodo, S.T. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius, Yogyakarta.